

KRITIK FILSAFAT EKO-FEMINISME TERHADAP KONSEP KEPEMIMPINAN SUAMI DALAM KELUARGA

The Philosophy of Eko-Feminism's Critiques to The Concept of Husband Leadership in Family

Siti Fatimah¹ dan Lasiyo²

*Program Studi Ilmu Filsafat
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

Patriarchal system practised in many societies confirm the concept of husband leadership in the family, including in the form of legal acts. Problem arises as that concept gives birth to the injustice conduct to women in patriarchal culture. This problem triggers the natal of feminist movement, including the eco-feminism fighting for justice for women. This thesis aims to study the criticism of eco-feminism against the concept of husband leadership in the family and the alternative leadership concept ecofeminism offers.

Ecofeminism concerns about three main topics, i.e. the relationship pattern between human being and God, human and human, also human and the nature. The fundamental principles in its methodology of reasoning are the unity, integrality, and harmony in wholeness. In studying the concept of husband leadership, the relevant topic is the relationship pattern between human and human, that when reflected critically will become the part of social philosophy study. Method used here is critical analysis involving the interpretation and critical evaluation of data.

Due to its fundamental principles of reasoning, eco-feminism criticize the concept of husband leadership in the family, especially, in Indonesia. The weakness of the concept is its inability to create the harmonic relationship pattern between husband and wife. The wife is always placed in subordinate position that she is not free to express herself as a human being. Eco-feminism offers the concept of leadership that place feminin quality as the base of leadership. This alternative leadership concept highly value the democratic attitudes in the form of proportional power sharing between husband and wife.

Key Words: *Eco-feminism -- leadership -- family -- harmony*

1. STAIN Cirebon

2. Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

PENGANTAR

Dominasi laki-laki atas perempuan semakin dikuatkan oleh pemahaman tafsir teks-teks Kitab Suci, khususnya dalam agama-agama Semitik. Laki-laki disebut sebagai pemimpin perempuan. Selanjutnya, laki-laki dilegitimasi untuk menjadi pemimpin keluarga atau kepala keluarga. Pada dasarnya, tidak ada persoalan sekalipun suami dibakukan untuk menjadi pemimpin keluarga. Persoalan muncul ketika ayat yang melegitimasi pengangkatan suami untuk menjadi pemimpin keluarga diterjemahkan dalam praktek kehidupan sebagai bentuk kekuasaan penuh laki-laki atas perempuan, suami atas istri. Pemberian hak-hak pada laki-laki yang lebih diutamakan daripada hak-hak perempuan, serta pemberian hak poligami mempunyai eksekusi yang mengakibatkan semakin kuatnya budaya patriarkhi. Wujud bentuk dominasi semakin nyata seiring dengan pemberian peran domestik pada perempuan dan peran publik pada laki-laki, istri harus taat pada suami tanpa batasan ketaatan yang jelas. Istri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (lihat pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No. 1/1974). Kewajiban ini terkesan hanya istrilah yang punya tanggungjawab atas semua persoalan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi ironis, sebab yang menjadi pemimpin suami, sementara yang bertanggung jawab hanya istri. Karenanya, pemberian peran domestik yang hanya dibebankan pada istri perlu dikaji ulang.

Penafsiran yang mendukung tradisi patriarkhi ini meluas ke seluruh dunia karena sifat misi agama-agama Semitik yang universal. Indoktrinasi patriarkhisme berlangsung atas baik laki-laki maupun perempuan selama ribuan tahun yang dengan sendirinya mengokohkan sistem itu sendiri. Dominasi laki-laki atas perempuan terasa begitu "alamiah" sehingga kadang dijalankan, diajarkan, dan diteruskan tanpa disadari oleh para pelakunya.

Kesadaran terhadap perbedaan antara fakta dengan konstruk sosial, yaitu kenyataan adanya perbedaan jenis kelamin dengan adanya sistem patriarkhi, muncul pada Abad Pencerahan (abad ke-17-18), bersamaan dengan maraknya gerakan humanisme, rasionalisme, dan terakhir sosialisme. Abad ini menggugah keberanian kaum perempuan untuk bangkit dari ketertindasan oleh sistem sosial dan sistem norma. Analisis jender mengambil alih peran teori-teori sosial yang masih memihak kepada sistem patriarkhi. Muncullah para feminis liberal, feminis Marxis, feminis sosial maupun feminis radikal. Mereka menyebut diri mereka femitis berdasarkan pandangan bahwa kepemimpinan laki-laki identik dengan dominasi kualitas maskulin atas kualitas feminin.

Eko-feminisme sebagai salah satu aliran Gerakan Zaman Baru bertujuan menggantikan paradigma sains yang maskulin dengan paradigma sains yang holistik dan ekologis dengan cara mengangkat kualitas feminin supaya terjadi keseimbangan antara Yin (feminin) dan Yang (maskulin) seperti dalam filsafat Tao. Meskipun memiliki ciri khas yang tidak ada pada gerakan feminisme sebelumnya, eko-feminisme tetap melanjutkan misi feminisme pada umumnya, yaitu melakukan kritik terhadap pola pikir maupun keputusan dan tindakan yang hanya menganggap penting kualitas maskulin, dan mengabaikan arti penting kualitas feminin. Eko-feminisme melihat, kedua kualitas ini sama-sama pentingnya untuk difungsikan oleh manusia dalam mengambil setiap kebijakan, terutama kualitas feminin. Hal ini bermanfaat untuk menghindari munculnya dominasi antara yang satu dengan yang lain. Jika diterapkan dalam keluarga, maka pemimpin keluarga, menurut konsep kepemimpinan Ekofeminisme hendaknya memfungsikan kualitas feminin sebagai *guidance* dalam melaksanakan kepemimpinannya, sehingga antara pemimpin dan yang dipimpin tidak saling mendominasi, tetapi bagaimana pemimpin keluarga membagi kekuasaannya dengan anggota-anggota keluarga yang lain, tanpa memberlakukan sikap dominasi. Anthony Giddens (Giddens, 1998: 89) menyebut keluarga yang demikian sebagai keluarga yang demokratis.

Penelitian ini bertujuan menemukan asumsi-asumsi dasar konsep kepemimpinan suami dalam keluarga, dan mengkaji kritik eko-feminisme terhadap asumsi-asumsi dasar tersebut, serta menemukan gagasan baru apa yang ditawarkan oleh eko feminisme.

Konsep Kepemimpinan Suami dalam Keluarga

Konsep kepemimpinan dalam keluarga yang dibakukan di Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh tradisi dan ajaran agama, khususnya agama Islam. Barangkali karena mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah umat Islam, maka konsep kepemimpinan dalam keluarga tampak banyak diwarnai hukum-hukum Islam. Secara normatif, Al-Qur'an memberi status yang sama antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi di sisi lain al-Qur'an juga menunjukkan adanya superioritas laki-laki "dalam konteks sosial tertentu". Sangat disayangkan bahwa para teolog telah mengabaikan konteks tersebut, dan menjadikan laki-laki sebagai makhluk superior dalam pengertian yang absolut. Para teolog tidak berusaha menangkap semangat sejati hukum-hukum al-Qur'an, khususnya yang menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan. Mereka tidak memilah antara ajaran yang bersifat kontekstual dan yang bersifat normatif (Ali, Asghar, E., 2000: lx-x).

Konsep kepemimpinan suami dalam keluarga untuk di Indonesia merujuk pada:

- a. Q.S.4:34,
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Konsep Kepemimpinan Suami dalam Keluarga Ditinjau dari Perspektif Filsafat Eko-Feminisme

Sebuah keluarga minimal terdiri atas suami, istri. Tujuan dibentuknya sebuah keluarga, pertama, ingin menyatu dengan seseorang yang dicintai, sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dalam menentukan siapa pasangan hidupnya. Kedua, yang lebih utama adalah membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga berfungsi sebagai wadah atau lembaga sosialisasi seluruh anggotanya, terutama anak dengan masyarakat. Oleh karena itu, keluarga diharapkan dapat berperan sebagai pengajar, pendidik, dan pemberi teladan yang mampu melahirkan generasi baru yang responsif, komunikatif, dan demokratis terhadap lingkungan masyarakatnya. Sementara itu, apakah konsep-konsep mengenai bagaimana keluarga yang baik (demokratis) yang dapat mendukung baik tujuan maupun fungsi keluarga sudah terpenuhi? Filsafat eko-feminisme mencoba membongkar ulang konsep-konsep yang telah ada dan mencoba memberi alternatifnya.

1. Tinjauan terhadap Pemahaman Hukum Islam

Sistem sosial dan sistem norma telah mengangkat dan membakukan suami sebagai pemimpin keluarga. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup sangat kental dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai misal, tuntunan mengenai hak dan kewajiban bagi suami maupun istri, dan siapa yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Hukum Islam yang terkait dengan pedoman berkeluarga juga tampak mewarnai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

- a. Apakah Q.S.an-Nisa 34, maupun al-Baqarah 228 yang mengukuhkan laki-laki untuk menjadi pemimpin keluarga tersebut ditujukan untuk kondisi sosial yang berlaku sepanjang zaman, atau zaman-zaman tertentu?. Bagaimana jika kondisi sosial di masa turunnya ayat tersebut berbeda dengan kondisi sosial sekarang ini, sehingga jika pemahamannya dipaksakan tetap sama dan tetap diberlakukan akan melahirkan persoalan ketidakadilan?
- b. Apakah laki-laki yang diangkat menjadi pemimpin tersebut

adalah semua laki-laki pada umumnya, atau hanya laki-laki yang hanya memenuhi kriteria kepemimpinan? Jika ya atau tidak, apa argumennya? Kriteria kepemimpinan seperti apa yang dianggap baik dan benar? Menurut Filsafat eko-feminisme, kriteria kepemimpinan yang manusiawi adalah yang mengoptimalkan dan memfungsikan kualitas feminin (meminjam istilah Anthoni Gidden, kepemimpinan demokratis).

- c. Jika ternyata laki-laki (suami) tidak mampu memberi, atau tidak mau memberi nafkah, dan tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, apakah ia masih berhak menjadi pemimpin dalam keluarga?

2. Tinjauan terhadap Undang-undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Pasal 31 ayat 3: Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Kata "kepala" atau pemimpin dalam ayat ini memunculkan banyak pertanyaan:

- 1) Sejauh mana "kepala" atau "ibu" rumah tangga berperan dalam keluarga, karena telah ada dikotomi pembagian tugas antara ayah dan ibu yang seakan akan terkesan hanya berkuat pada wilayah masing-masing. Bukankah dikotomi seperti itu membuka ruang untuk tidak saling bekerjasama antara yang satu dengan yang lain sehingga masalah keluarga tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sementara persoalan dalam rumah tangga apa pun jenisnya menuntut penyelesaian yang kompak antara seluruh penghuni keluarga. Setiap anggota dalam keluarga saling terkait, tergantung, saling mempengaruhi dan menentukan satu sama lain.
- 2) Kriteria kepemimpinan yang seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini. Adanya paket dikotomi pembagian tugas dalam keluarga yang merupakan keputusan sepihak, minimal mencerminkan bahwa kriteria kepemimpinan ini bukanlah kepemimpinan yang demokratis. Sementara jika mengingat bahwa seluruh makhluk di bumi ini, secara ontologis saling membutuhkan kerjasama yang demokratis dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan, maka kurang tepat jika dalam keluarga diterapkan sistem pemerintahan yang otoriter. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi seluruh penghuninya, sehingga jika setiap keluarga menerapkan sistem yang otoriter, akan terciptalah sebuah masyarakat yang otoriter.
- 3) Bagaimana jika suami tidak memenuhi kriteria kepemim-

pinan?

Secara ontologis, tidak semua laki-laki memiliki kriteria kepemimpinan. Mengenai kriteria kepemimpinan sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Jika memang demikian halnya, bagaimana solusinya? Sementara kenyataan yang ada sampai saat ini, konsep bahwa "laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan (suami adalah pemimpin keluarga) adalah berlaku bagi semua laki-laki secara umum. Jika demikian halnya, sama saja konsep ini tidak berorientasi pada idealisasi, sehingga cita-cita membentuk masyarakat madani akan betul-betul tinggal sebuah slogan saja.

- 4) Jika diangkatnya suami sebagai kepala rumah tangga adalah karena ia wajib memberi nafkah, bagaimana jika ia tidak sanggup atau tidak bertanggung jawab memberi nafkah, apakah ia masih berhak untuk menjadi seorang pemimpin? Dalam kenyataannya, tidak sedikit laki-laki yang malas bekerja, dan istri yang mencari nafkah.

Dapat diamati bahwa ayat ini akan membawa konsekuensi terciptanya hubungan yang kurang harmonis antara setiap anggota dalam keluarga sebab tidak ada kerjasama yang saling melibatkan diri untuk memecahkan dan menyelesaikan segala urusan dalam rumah tangga. Masing-masing bertumpu pada yang sudah ditetapkan. Sementara banyak persoalan dalam rumah tangga yang penanganannya menuntut terlibatnya semua anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Rumah tangga yang kokoh adalah rumah tangga yang dilandasi dengan pondasi saling mengasihi, saling mengerti, saling memahami, saling memperhatikan, saling berbagi bukan saling menuntut, saling kerjasama dan menghormati antara anggota-anggotanya. Firman Allah berfirman:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Nuriyah, S., 2001: 26-27).

- 1) Sejauh apa ibu harus berperan dalam rumah tangga? Ibu yang diberi paket peran domestik harus menjalani berbagai tugas rumah tangga yang tak pernah jelas batasannya, sehingga tak terkira berat bebannya. Sistem dan norma patriarkhis telah memenjarakan perempuan (istri) dalam sektor ini. Ruang gerak perempuan yang terbatas ini menggiring perempuan pada sikap apatis, pasif, dan submisif, sehingga terkesan lemah dan bodoh. Padahal jika dari awal perempuan memiliki ruang gerak yang sama dengan laki-laki,

kemungkinan kondisi perempuan akan berbeda dengan sekarang. Perempuan akan lebih mandiri dan dapat mengembangkan segala kapasitasnya. Hal ini terbukti dengan munculnya aktivis-aktivis perempuan yang muncul dewasa ini yang mengisi ruang publik dalam segala bidang.

b. Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kata "wajib melindungi" dalam ayat ini mengesankan bahwa istri adalah lemah dan bodoh, sementara kata "memberi segala sesuatu keperluan hidup" mengesankan bahwa istri adalah miskin dan tidak berdaya. Dalam ayat ini seharusnya ditambah dengan kata "saling" sehingga berbunyi "saling melindungi" dan "saling memberi". Hal ini untuk menghindari adanya penafsiran yang memunculkan sikap subordinatif dan otoriter suami terhadap istri. Kiranya kekhawatiran ini bukanlah tidak terbukti, bahkan banyak hasil penelitian yang menunjukkan adanya sikap patriarkhis laki-laki terhadap perempuan, suami terhadap istri. Kekerasan baik secara fisik maupun psikologis benar-benar menjadi kenyataan dalam masyarakat.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya. Kata "wajib" dalam ayat ini merupakan bahasa perintah yang otoriter tanpa memberi peluang untuk "berpendapat dan berbagi". Maksud kalimat dalam ayat ini pun sangat tidak jelas batasannya. Alangkah luas dan dalamnya urusan rumah tangga. Sangat tidak manusiawi jika segala urusan rumah tangga diserahkan, dibebankan, dan diwajibkan pada istri. Ayat ini memberikan peluang bagi suami untuk bersikap semena-mena, karena merasa urusan rumah tangga adalah urusan istri. Sikap ini merupakan sikap sepihak yang membuat istri menderita, baik secara lahir maupun secara batin. Sementara zaman bergulir menghantar ke era kontemporer, IPTEK semakin canggih, dan melahirkan berbagai kebutuhan yang mendesak seseorang untuk terpenuhi. Kondisi zaman menuntut orang harus kerja keras dan kerjasama yang solid demi kesuksesan tujuan. Kenyataan ini menuntut kerjasama antara perempuan (istri) dengan laki-laki/suami untuk sama-sama ikut terlibat dalam urusan domestik maupun publik. Bahkan bukan hanya melibatkan kerjasama antara suami dan istri, tetapi seluruh anggota keluarga dan semua orang yang sekiranya dapat diajak kerjasama. Kebersamaan dan kebersatuan lebih memberikan jaminan keberhasilan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Konsep Kepemimpinan Suami dalam Keluarga dalam Pandangan Filsafat Eko-Feminisme

Filsafat eko-feminisme melihat manusia dari cara pandang yang ekologis dan holistik. Manusia terstruktur secara holistik, terpadu dengan sesama, dan lingkungan alam yang lain. Misi 'kesadaran' akan keterpaduan dan kebersamaan ini menjadi bagian intrinsik gagasan eko-feminisme. Subjek gerakan *New age* eko-feminisme- mengutamakan tema-tema kesatuan (integrasi), keseluruhan dan keutuhan (Bohm (1980), dalam Jurnal Perempuan 20, 2001: 13). Hal ini relevan dengan teori Primavesi yang berbicara mengenai ekosistem bumi. Bumi merupakan ekosistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling membutuhkan, saling terkait, saling mempengaruhi, dan menentukan. Bagian-bagian itu menyatu dalam satu kesatuan, dalam kebersamaan membentuk jaringan kehidupan. Tema-tema ini mengiyaratkan betapa penting makna kebersatuan dan keutuhan, serta kebersamaan dari tiap-tiap bagian yang ada dalam keseluruhan sistem kehidupan. (Primavesi, 1991: 7-14).

Jika teori ini diterapkan dalam keluarga, maka setiap bagian atau anggota keluarga menyatu, utuh dalam keseluruhan ekosistem keluarga. Jika saja antara anggotanya saling bekerjasama dengan baik tanpa adanya unsur yang mendominasi atau mengeksploitasi, saling kerjasama dan saling memiliki solidaritas yang tinggi, maka rantai keharmonisan satu sama lain akan terjaga. Secara umum, sebuah keluarga akan dipandu seorang pemimpin. Sistem maupun norma sosial, serta ajaran agama telah melegitimasi suami untuk menjadi pemimpin dalam keluarga tidaklah menjadi persoalan sepanjang suami tersebut memenuhi kriteria bagi seorang pemimpin.

Sesuai dengan konsep filsafat eko-feminisme, seorang pemimpin harus memiliki kriteria sebagai seorang pemimpin. Konsep maupun praktek kepemimpinannya harus mampu menjaga keutuhan dan kasatuan dan kebersamaan bagi seluruh anggota keluarga. Model kepemimpinan dalam filsafat eko-feminisme tampak seperti yang diwujudkan oleh gerakan *Osho (the Osho Movement)*. Yakni model kepemimpinan perempuan yang mengunggulkan kualitas feminin. Kepemimpinan ini dijadikan alternatif untuk menyempurnakan model kepemimpinan laki-laki yang hanya mengunggulkan kualitas maskulin. Model kepemimpinan laki-laki yang maskulin disinyalir penuh dominasi, hegemoni, dari represi, sementara dalam praktiknya sering mengalami kegagalan (Sukidi, 2001: 14).

Kiranya ketidakseimbangan itu memacu membangkitkan hasrat para feminis *New age* (eko-feminisme) untuk mengembalikan kesadaran

manusia akan pentingnya memfungsikan secara optimal kualitas feminin dalam konsep dan sikap kepemimpinan. Kecenderungan berat sebelah yang maskulin ini merupakan identitas karakter patriarkhis yang selama ini identik dengan laki-laki. Pada dasarnya kualitas maskulin tidaklah identik dengan laki-laki, begitu juga kualitas feminin bukan identik dengan perempuan. Kualitas maskulin dan feminin merupakan karakter yang keduanya dimiliki oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat diamati secara mudah karena tidak sedikit laki-laki yang memiliki sifat lembut, berkasih sayang tinggi, jujur, dan bijaksana. Sebaliknya, tidak sedikit pula perempuan yang memiliki sifat kasar bahkan sanggup membunuh, pemberani tampil ke publik dan banyak juga yang sukses baik dalam bidang keintelektualan maupun bidang usaha lainnya. Ini adalah sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kualitas maskulin maupun feminin di dalam dirinya. Kedua kualitas ini semestinya difungsikan oleh manusia secara optimal dan seimbang dalam kehidupannya.

Belajar dari fakta sejarah yang telah menyuguhkan bukti-bukti kegagalan kaum laki-laki yang patriarkhis dalam memimpin dunia, bahkan sikap dominasi dan eksploitasinya telah merusak ekosistem bumi, maka dengan alasan inilah para eko-feminis menyuguhkan konsep kepemimpinan alternatif yang mengoptimalkan kualitas feminin dalam menjalankan kepemimpinannya. Kualitas feminin tersebut antara lain: intuitif, responsif, kooperatif, koordinatif, penuh cinta dan kasih sayang, kejujuran, kepedulian, pemelihara dan pelestari. Kualitas feminin ini dijadikan sebagai *guidance* dalam menjalankan kepemimpinan, dengan harapan menghasilkan keseimbangan dan keharmonisan dalam segala bidang kehidupan. Selain itu, dalam jangka panjang kepemimpinan eko-feminisme diharapkan meminimalisir dan menghapus segala bentuk konflik dan kekerasan atas nama apa pun, seraya mengafirmasikan nilai-nilai cinta, kasih sayang, harmoni dan keseimbangan (Sukidi, 2001: 14-15).

Kepemimpinan yang mengunggulkan kualitas feminin disebut juga sebagai spiritual politik. Spiritual politik digunakan sebagai alternatif untuk menggeser politik sekuler yang cenderung sarat dengan perebutan kekuasaan, penipuan, bahkan manipulasi. Dalam pandangan filsafat eko-feminisme politik ini disebutnya sebagai politik yang membunuh. Politik kepemimpinan eko-feminisme sarat dengan cinta kasih (*love and compassion*), kejujuran (*honesty*), koordinasi (*coordination*), santun dan *civilized* dan bertujuan menggeser kepemimpinan yang membunuh ke arah kepemimpinan yang tidak membunuh (McLaughlin, C. and Gordon

Davidson, 1994: 6). Elizabeth Puttgik (1999) menyebut kepemimpinan yang dikonsepsikan filsafat eko-feminisme ini sebagai kepemimpinan hati (*the heart leadership*) (Sukidi, 2001: 16).

Seperti apa kepemimpinan hati yang dijadikan sebagai alternatif untuk menggeser kepemimpinan laki-laki tersebut? Dalam karya terbaik dan mutakhirnya Sachiko Mulata (2000: 38-39) menyatakan sebagai berikut.

Barang siapa yang bercita-cita mengatur sebuah negara, maka terlebih dahulu harus mengatur keluarganya secara benar. Barang siapa ingin mengatur keluarganya secara benar, maka sebelumnya harus mengatur dirinya sendiri dengan benar. Barang siapa ingin mengatur diri sendiri dengan benar, maka terlebih dulu harus membuat hatinya menjadi benar (Murata S., 2000: 38-39).

Badan atau diri merupakan fondasi bagi kesadaran manusia dan dasar bagi pertalian seluruh umat manusia. Oleh karena itu badan harus dilatih sedemikian rupa untuk bertindak secara benar atau beradab dalam segala situasi. Pelatihan dan pengolahan badan dengan cara mengupayakan segala perbuatan adalah bersih atau baik, sehingga membentuk dan melatih jiwa menjadi akhlaqul karimah (akhlaq yang mulia) (Murata S., 2000: 38-42). Salah satu bentuk kepemimpinan yang relevan dengan konsep yang diajukan oleh filsafat eko-feminisme adalah bentuk kepemimpinan demokrasi. Oleh karena itu konsep kepemimpinan alternatif yang diusulkan oleh filsafat ekofeminisme adalah konsep kepemimpinan yang demokratis.

Relevan dengan hal tersebut, untuk mengatur keluarga secara benar, menurut rumusan Anthony Giddens adalah dengan cara yang demokratis, sehingga keluarga yang benar adalah keluarga yang demokratis (Giddens A., 1998: 89). Keluarga merupakan institusi dasar bagi masyarakat madani. Kebijakan yang diberlakukan dalam keluarga merupakan batu ujian yang penting bagi lahirnya babak politik baru dalam masyarakat yang lebih luas di masa berikutnya.

Menurut Giddens keluarga yang bertipe tradisional sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, alasannya antara lain sebagai berikut.

1. Kita menghadapi proses-proses perubahan yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat melampaui kapasitas pelaku politik apa pun untuk dapat mengembalikan arahnya.
2. Bernostalgia mengenai keluarga tradisional berarti bercita-cita ke masa lalu, di mana pelecehan seksual terhadap anak-anak dan perempuan lebih sering terjadi.
3. Keluarga tradisional mengutamakan faktor ekonomis dan keke-

batan. Cinta dan keterlibatan emosional tidak menjadi dasar perkawinan.

4. Perkawinan tradisional didasarkan pada ketidaksetaraan pria dan wanita, istri menjadi harta milik suami secara legal.
5. Secara umum, keluarga tradisional melibatkan standar ganda dalam urusan seksual. Wanita yang sudah menikah harus selalu penuh akan 'kebajikan', untuk memastikan nilai paternitas. Laki-laki diberi hak seksual yang lebih besar.
6. Dalam keluarga tradisional anak, banyak diterima sebagai hal yang normal bahkan didambakan. Sekarang tidak lagi, karena banyak anak tidak lagi dianggap sebagai hal yang menguntungkan, tetapi malah menjadi beban ekonomi. Cara pengasuhan anak-anak pun telah berbeda secara mendalam (Giddens, 2000: 102-106).

Keluarga tradisional sudah tidak bisa lagi dijadikan titik pijak awal karena selain faktor-faktor di atas, keluarga tradisional juga kesohor dengan nilai feodalitasnya. Nilai kultur feodalitas ini berpengaruh besar pada pengekan perkembangan jiwa serta kebebasan seluruh anggota keluarga. Hal ini akan menimbulkan ketidakberesan terjadi dalam keluarga, perkawinan, dan pengasuhan anak-anak. Persoalannya adalah strategi politis efektif macam apa yang dapat memperbaikinya, dan kondisi ideal macam apa yang kita perjuangkan sebagai alternatifnya?

Menurut Giddens (2000: 106), cara mengatasinya pertama, yang paling fundamental harus segera dimulai adalah menumbuhkan kesadaran cara pandang tentang prinsip kesamaan derajat antarjenis kelamin, dan tak ada cara mundur lagi dari prinsip ini. Setelah itu menerapkan prinsip demokrasi dalam keluarga, agar keluarga terdemokratisasikan melalui proses-proses seperti yang berlangsung dalam demokrasi publik. Pendemokrasian tersebut akan menghantar bagaimana kehidupan keluarga mengkombinasikan pilihan individu dan solidaritas sosial.

Demokrasi dalam ruang keluarga kriterianya amat mirip dengan demokrasi dalam ruang publik. Demokrasi publik melibatkan kesamaan formal, hak-hak individual, diskusi publik mengenai berbagai isu tanpa kekerasan, dan otoritas merupakan hasil dari negosiasi, bukan diwariskan oleh tradisi. Keluarga yang didemokratisasi memiliki ciri-ciri ini, dan beberapa di antaranya telah dilindungi oleh hukum nasional dan internasional, misalnya hak keamanan anak-anak dalam keluarga. Demokrasi dalam keluarga mengimplikasikan kesetaraan, saling menghormati, otonomi, pengambilan keputusan melalui komunikasi, serta bebas dari kekerasan. Karakteristik ini mengisi model hubungan seluruh anggota keluarga, suami-istri, orang tua anak.

Hubungan keluarga yang demokratis mengimplikasikan tanggung jawab bersama atas pengasuhan anak secara seimbang, kerjasama dalam segala bidang kehidupan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, antara orang tua dan non-orang tua. Dalam perkawinan laki-laki dan perempuan harus menyadari bahwa perjumpaan seksual membawa peluang tanggung jawab seumur hidup terhadap masing-masing pasangan maupun anak hasil perkawinan tersebut. Keluarga yang demokratis bercirikan adanya: kesetaraan emosional dan seksual, hak dan tanggung jawab timbal-balik dalam berbagai hubungan, menjadi orangtua bersama, kontrak orangtua seumur hidup, otoritas terhadap anak berdasarkan negosiasi, kewajiban anak terhadap orangtua, dan keluarga yang terintegrasi secara sosial (Giddens, 2000: 106-110).

Keluarga yang demokratis akan dapat terwujud apabila setiap anggotanya juga memiliki jiwa yang demokratis. Setiap diri dalam keluarga punya kesadaran yang tinggi untuk introspeksi mengatur dirinya sendiri secara benar. Meminjam istilah James Redfield (1994: 17), "diri yang *genuine*". Diri yang telah mengalami secara perlahan kebangkitan kesadaran spiritual. Kesadaran yang mampu menemukan makna sesuatu yang baru mengenai kehidupan manusia di planet ini, yakni tentang makna eksistensi. Diri yang mampu mentransendier alam eksistensi menuju alam esensi.

Ilustrasi Redfield sangat menggambarkan sisi-sisi jiwa dan diri yang demokratis. Diri yang telah mampu melunakkan ego untuk tidak menguasai pihak lain. Jika seseorang telah mampu melunakkan egonya ia akan dapat hidup berbagi dengan orang lain, karena hidup berbagi adalah buah dari sifat yang demokratis. Di dalam keluarga, sifat demokratis yang dimiliki oleh setiap anggotanya merupakan saham ketenangan dan kebahagiaan bagi keseluruhannya. Karena di dalamnya tidak ada anggota yang saling menuntut, tetapi malah saling memberi apa yang menjadi milik dan kelebihan masing-masing anggota, baik berupa ide, tenaga, maupun material. Jika sudah demikian terwujud dan terbukti kebenaran teori Anne Primavesi mengenai ekosistem bumi, bahwa tiap-tiap bagian saling mempengaruhi, menentukan, membutuhkan dan menentukan pada bagian yang lain.

Cara pandang membangun keluarga demokratis yang bermuara pada kesadaran diri, hati, dan jiwa menjadi ciri khas visi zaman baru (*new age*), seperti eko-feminisme. Ini berarti bahwa keluarga yang demokrasi akan terwujud jika tiap-tiap anggota keluarga membangun diri, jiwa, dan hati secara benar, membangun kesadaran untuk berpikir dan bersikap demokrasi. Senada dengan hal ini, feminis *new age*, James Redfield (1994: 15) menyatakan, "untuk dapat mengubah dunia, maka

terlebih dahulu kita harus mengubah diri sendiri".

Untuk membangun hati menjadi benar, mula-mula harus mematuhi pesan moral dari norma-norma agama dan norma masyarakat yang baik. Berik selanjutnya berusaha menumbuhkembangkan kesadaran dengan cara refleksi diri, menstansendier setiap gagasan dan tindakan agar apa yang dipikirkan dan dilakukan memiliki makna, baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Hal yang amat penting untuk ditumbuhkan dan dilatih dalam jiwa adalah keadaan untuk berbagi hidup (*share* dan *care*) dengan orang lain, tanpa mengharap imbal balik. Jika masing-masing anggota keluarga, masyarakat, negara, maupun dunia mempunyai kesadaran yang demikian, maka "kondisi hartnoni" akan terwujud dengan sendirinya baik dalam keluarga, negara, maupun dunia. Konsep kepemimpinan demokrasi semacam inilah yang disuguhkan filsafat eko-feminisme, yang dijadikan sebagai alternatif untuk mengganti konsep kepemimpinan suami dalam keluarga yang dianggap cenderung maskulin patriatik.

KESIMPULAN

Dengan selesainya penelitian tesis ini, didapatkan bahwa ideologi dan kultur patriarkhi masih sangat kental dalam praktek kehidupan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan lahirnya gerakan feminisme modern. Gerakan feminisme modern bertujuan memperjuangkan nasib kaum perempuan dari ketertindasan kaum laki-laki. Cara yang ditempuh adalah dengan memasuki dunia laki-laki agar kedudukan dan statusnya sama dengan laki-laki. Untuk itu kaum perempuan harus menghidupkan dan memfungsikan secara optimal kualitas feminin agar mampu bersaing dengan laki-laki. Gerakan ini tampak mengaplikasikan doktrin filsafat eksistensialisme, bahwa tidak ada perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan. Feminisme modern yang mengembangkan paradigma ini yakni, feminisme liberal, sosialis/marxis, radikal. Epistemologi yang dipakai oleh feminisme modern dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran tetap memakai epistemologi yang patriarkhi. Feminisme modern yang menggunakan epistemologi patriarkhi ini memiliki kekurangan, yakni, pendekatannya tidak akan dapat meruntuhkan sistem patriarkhi pada dunia maskulin, kecuali hanya mengubah komposisi aktor-aktornya saja. Dunia maskulin yang semula didominasi oleh kaum laki-laki, sekarang telah banyak dimasuki oleh perempuan yang ikut aktif didalamnya. Para perempuan menjadi *male clone* (tiruan laki-laki). Inilah salah satu faktor yang ditolak oleh gerakan eko-feminisme.

Filsafat eko-feminisme, dengan tiga ide besarnya -Tuhan, manusia, dan alam- merupakan sebuah gagasan dan gerakan yang bercita-cita

besar. Ia ingin mengembalikan bumi seisinya menjadi sebuah ekosistem yang aman, tenteram, dan damai, terpelihara, dan lestari. Bumi seisinya merupakan ekosistem yang setiap bagiannya -manusia, hewan, tumbuhan (biotik), dan abiotik membentuk jaring-jaring atau rantai kehidupan, bagian yang satu terkait dengan yang lain secara keseluruhan. Refleksi kritis atas keterkaitan atau keterhubungan ini menjadi landasan dasar filsafat eko-feminisme dalam berupaya tetap menjalin dan menciptakan pola relasi yang harmonis antara satu dengan yang lain.

Salah satu cita-cita besar filsafat eko-feminisme, sebagaimana yang telah disinggung, adalah ingin menciptakan relasi yang harmonis antarmanusia, laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Hal penting yang ditawarkan untuk mewujudkan cita-cita itu adalah sebuah gagasan mengenai "konsep kepemimpinan" yang menggunakan kualitas feminin sebagai *guidance* dalam menjalankan kepemimpinannya. Konsep kepemimpinan ini mengutamakan keutuhan, kesatuan, kebersamaan, dan keharmonisan yang syarat dengan nilai-nilai demokratis. Kepemimpinan semacam inilah yang dijadikan filsafat ekofeminisme sebagai "kepemimpinan alternatif" untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan demokratis. Dalam keluarga yang harmonis dan demokratis diharapkan lahir generasi-generasi baru yang berjiwa harmonis dan demokratis pula, sehingga akan tercipta keluarga-keluarga baru dalam waktu berikutnya masyarakat baru, dan negara baru yang harmonis dan demokratis. Cita-cita ini mungkin terlihat *utopis*, tetapi penulis memiliki keyakinan, setidaknya jika ada upaya dari berbagai pihak, khususnya upaya untuk melihat ulang tafsir dan pemahaman terhadap teks, kemudian mengubah UU Perkawinan tahun 1974 yang keduanya bernuansa patriarkhis, yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam menjalankan kepemimpinan dalam keluarga, insya Allah, minimal akan semakin banyak tipe keluarga yang mempraktekkan pola kepemimpinan yang demokratis, yang lebih menjamin terwujudnya kesatuan, keutuhan, kebersamaan, dan keharmonisan. Semakin banyak keluarga yang mempraktekkan kehidupan yang demokratis, maka akan membentuk sebuah masyarakat, bangsa, maupun negara yang demokratis pula.

Ideologi dan budaya patriarkhi akan berubah atau hilang manakala ada kemauan yang kuat dari berbagai pihak untuk mengubah dan menghilangkannya. Kaji ulang terhadap penafsiran dan pemahaman teks-teks ayat suci yang bias gender sangat penting, baik untuk membongkar peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun peraturan-peraturan yang diterapkan dalam keluarga yang bernuansa

patriatik.

Kebesaran jiwa kaum laki-laki untuk memberi kebebasan pada kaum perempuan untuk mengekspresikan dirinya, dan kemampuannya akan membantu kaum perempuan lebih mandiri, bangkit dari kelemahan, kemiskinan, dan kebodohan. Perempuan yang mandiri, baik yang kuat pisik maupun psikisnya, yang kaya, dan yang tidak bodoh, justru akan dapat menjadi partner laki-laki yang mampu diajak kerjasama dalam memecahkan persoalan hidup secara lebih baik.

Kepemimpinan yang demokratis, tidak otoriter, akan lebih menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan setiap anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Aqqad, A., 1986, *Filsafat Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abbott, M.R., 1992, *Masculine and Feminine: Gender Roles Over The Life Cycle*, New York: McGraw-Hill.
- Adams, C.J., (ed.), 1993, *Ecofeminism and The Sacred*, New York: The Continuum Publishing Company.
- Al Gore, 1994, *Bumi Dalam Keseimbangan Ekologi: Ekologi dan Semangat Manusia*, alih bahasa oleh Hira Jamtani, Jakarta: Obor.
- Ali al-Hasyimi, M., 2002, *Muslimah Ideal (Pribadi Islami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah)*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ali, Asghar E., 2000, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak).
- Alimi, M.Y., 1999, *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS.
- Azeem, S.A., 2001, *Sabda Langit, Pertemuan dalam Tradisi Islam, Yahudi dan Kristen*, alih bahasa oleh Sri Suhanjati Sukri dan Riswan, Yogyakarta: Gema Media.
- Baidhawi, Z. ed., 1997, *Wacana Teologi Feminis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakker, A. dan Ahmad Kharris Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Banawiratma, 1997, "Gerakan Eko-feminisme", dalam *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Jender*, Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY).
- Baso, Z.A., 2000, *Langkah Perempuan Menuju Tegaknya Hak-hak Konsumen*, Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen.
- Baswedan AR., 1955, *Kepemimpinan dan Wanita dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Surya Muda.
- Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dan Bidang Penerbitan

- Kalyanamitra, 1999, *Menghadapi kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalyanamitra.
- Braidotti, R. dkk., 1994, *Women, the Environment and Sustainable Development (Towards a Theoretical Synthesis)*, Santo Domingo: Instraw.
- Budiman, A., 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia.
- Budiman, K., 2000, *Feminis Laki-laki dan Wacana Gender*, Magelang: Indonesiatara.
- Dellyama, S., 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Derksen, L.D., 1983, *On Universal Hermeneutic: A Study In The Philosophy of Hans-Georg Gadamer*. Amsterdam: VU BoekhandeWijgeverij.
- Echol, J.M. dan Shadily, H., 1992, *Kamus Indonesia -Inggris (An Indonesian-English Dictionary)*, Jakarta: PT Gramedia.
- Faryabi, A., 1994, *Perkawinan menurut Pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Elly, M.H., (tanpa tahun), *Derita di Balik Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa Womens Crisis Center.
- Engels, F., 1972, *The Origin the Family, Private Property, and the State*, New York: Pathfinder Press.
- Fahri A., 1984, *Perkawinan, Seks, dan Hukum*, Pekalongan: T.B. Bahagia.
- Fakih, M., 1987, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, M., (ed.) 1999, *Perisai Perempuan*, Yogyakarta: LBH APIK.
- Forum Kajian. Kitab Kuning (FK-3), 2001, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: LKS.
- Giddens, A., 2000, *The Third Way*, alih bahasa oleh Ketut Arya Mahardika. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- , 1998, *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, London: Polity Press
- Goode, W.J., 1993, *Sosiologi Keluarga*, alih babasa oleh Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara.
- Greetz, H., 1961, *Keluarga Jawa*, alih bahasa oleh Hersri, 1993, Jakarta: Grafiti Pers.
- Hardiwadoyo, P., 1990, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik (Implikasi dalam Kawin Campur)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan, R., 1993, *Filsafat Sex*, Yogyakarta: Bentang.
- Handayani, S. dkk., 1997, *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*, Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY).
- Hasyim, S., 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan.
- Hasyim, N. dkk. *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Hearsey, P., 1991, *Kepemimpinan Kontekstual*, Yogyakarta: Pusat Pastoral.
- Heider, J., 2000, *Kepemimpinan Tao*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Homby AS., Parnwell E.C., 1969, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Intermedia.

- Ibrahim, I.S. dkk., 1998, *Wanita dan Media: Konstruksi Idiologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*, Bandung: PT Remaja Rusdakarya.
- Jacob, T., 1993, *Manusia Ilmu Dan Tegnologi: Pergumulan Abadi Dalam Perang dan Damai*, Yogyakarta: Tirta Wacana.
- Kartodirdjo, S., 1984, *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Kinnon, M.H.M., dan Moni Mac Intyre, 1995, *Readings in Ecologi and Feminist Theology*, Kansas: Sheed & Ward.
- Klein, D.M. dan James M. White, 1996, *Family Theories: An Introduction*, California: Sage Publications.
- Kodir, F.A., 2001, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS.
- Leclerc, A., 2000, *Kalau Perempuan Angkat Bicara*, Yogyakarta: Kanisius.
- McLaughlin dan Gordon Davidson, *Spiritual Politics: Changing the World from the Inside out*, AS: Ballantine Books.
- Mardimin, J., 1994, *Jangan Tangisi Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Martin, R. 1993, *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Matsui, Y., 2002, *Perempuan Asia dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mauld, J., dkk., 1999, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta: LKPSM.
- Metchel, D., 1984, *Sosiologi: Suatu Analisa Sistem Sosial*, Jakarta: Bina Aksara.
- Megawangi, R., 1999, *Membiarian Berbeda*, Bandung: Mizan.
- Moore, H.L., 1998, *Beminisme dan Antropologi*, alih bahasa oleh Tim Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI, Jakarta: Obor.
- Mosse, J.C., 1993, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa oleh Hartian Silawati (2002), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, H., 2002, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dah Gender*, Yogyakarta: LKiS.
- Murata, S., 2000, *Chinese Gleams of Sufi Light, Wang Tai-yu's: Great Learning of the Pure and Real, Liu Chih's: Displaying the Concealment of the Real Realm*, US: State University of New York Press.
- , 1992, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Jender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, alih bahasa oleh Rahman Astuti dan M.S. Nasrullah, 1999, Bandung: Mizan.
- Nasr, S.H., 1980, *Living Sufism*, London: Unwin Paperbacks.
- , 1983, *Islam dan Nestapa Manusia Modern*, alih bahasa oleh Anas Wahyuddin, Bandung: Pustaka.
- , 1990, *Curriculum Vitae of S.H. Nasr*, The George Washington University: naskah hasil korespondensi dengan Nasr, 30 Januari 1990.
- , 1986, *Sains dan Peradaban di dalam Islam*, alih bahasa oleh J. Mahyudin, Bandung: Pustaka.

- Nasif, F.U., 1999, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntutan Islam*, Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Neufeldt, Victoria (ed. In Chief), 1986-1992, Guralnik, David B. (ed. In Chief (to 1985), *Websters New World College Dictionary*, Third edition, Macmillan-USA: The Official Dictionary of the Associated Press.
- Nuriyah, S., dkk., 2001, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, Yogyakarta: LkiS.
- Paulus II, P.Y., 1983, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Jakarta: Sekretariat Mawi & Obor.
- Primavesi, A., 1991, *From Apocalypse to Genesis: Ecology, Feminism and Christianity*, Tunbridge Wells: Burns & Oates.
- Redfield, J., 2000, *Manuskrip Celestine*, alih bahasa oleh Alfons Taryadi, Jakarta: P.T. Gramedia.
- Rijal, F. dkk., 1993, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Ritonga, A.H., dkk., 1996, *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah Sumatra Utara*, Medan: Bagian Proyek P2NB Dimas P&K Sumatra Utara.
- Roslani, 2000, *Wacana Spiritualitas Timur dan Barat*, Yogyakarta: Qalam.
- Ruether, R.R., 2000, *Women Healing Earth*, New York: Orbis Books, Maryknoll.
- Ruether, RR, 1998, *Introducing Redemption Christian Feminism*, England: Sheffield Academic Press.
- Russel, L.M. dkk., 1998, *Perempuan dan Tafsir Kitab Suci*, Yogyakarta: Kanisius.
- Saadawi, N.E., 2001, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saidi, R., (tanpa tahun), *Kepemimpinan Islam Indonesia Kini dan Esok*, Yogyakarta: Antar Kota.
- Sanders, J.O., 1974, *Kepemimpinan Rohani*, Bandung: Kalam Hidup.
- Satuan Tugas Penyusun Naskah, 1994, *Motivasi Peningkatan Peran Wanita Menurut Islam*, Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Shihab, M.Q., 1977, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Shiva, V., 1988, *Bebas Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, alih bahasa oleh Hira Jhamtani, 1998, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- , 1994, *Dari Bio-Imperialisme ke Bio-Demokrasi*, alih bahasa oleh Sri Nurhayati, Jakarta: Gramedia.
- Soemiyati, S.H., 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (UU no. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan), Yogyakarta: Penerbit. Liberty.
- Subono, N.I., 2000, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan & The Asia Foundation.
- Sukidi, 2001, *New Age Wisata Spiritual Lintas Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- , 2001, *Spiritualitas Feminis dalam Gerakan New Age*, Jakarta: Yayasan Jurnal

- Perempuan & The Asia Foundation
- Suhandjati, S., 2001, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Suwarni, C., tanpa tahun, *Psikologi Keluarga: Hubungan Intra Keluarga*, Yogyakarta: Team Pembina Persiapan Keluarga.
- Umar, N., 1999, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- , 1999, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender & Perserikatan Solidaritas Perempuan.
- Sukri, S.S. dan Ridin Soryan, 2001, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Suseno, F.M., 2000, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Rifka Annisa, 1997, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Tim Risalah Gusti, 1996, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perpektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Tong, R.P., 1998, *"Ecofeminism", Feminist Thought*, Colorado: Westview Press.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Surabaya: Pustaka Tinta
- Warren, K.J., 1996, *Ecological Feminist Philosophies*, Amerika: Indiana University Press.
- Walstonecraft, M., dan John Stuard Mill, 1955, *The Right of Women - The Subjection of Women*, London: J.M. Dent & Sons Lrd - New York: E.P Dutton & Co Inc.
- Whitehead, E., 1996, *Kepemimpinan dan Kekuasaan: Sebuah Tinjauan Ilmu Sosial Agama*, Yogyakarta: Pusat Pastoral.
- Yusuf, M., 2000, *Perempuan Agama dan Pembangunan: Wacana Kritik atas Peran dan Kepemimpinan Wanita*, Yogyakarta: Lembaga Study dan Inovasi Pendidikan Candi Gebang Permai.